



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri D Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri D Nomor 12);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 72);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2016-2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 82);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 84);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bantul.
4. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

BAB II SISTEMATIKA PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja PD Tahun 2018 ini menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2018

(2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Evaluasi Renja Sampai dengan Triwulan II Tahun 2018;

Bab III : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

Bab IV : Penutup.

Pasal 3

(1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) ayat (1) terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Sekretariat Daerah;
- b. Perubahan Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Perubahan Renja Inspektorat Daerah;
- d. Perubahan Renja Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
- e. Perubahan Renja Badan Daerah;
- f. Perubahan Renja Dinas Daerah;
- g. Perubahan Renja Kantor Daerah; dan
- h. Perubahan Renja Kecamatan.

(2) Perubahan Renja Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. Perubahan Renja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
- c. Perubahan Renja Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- d. Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

(3) Perubahan Renja Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e. Terdiri atas:

- a. Perubahan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
- b. Perubahan Renja Dinas Kesehatan;
- c. Perubahan Renja Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- d. Perubahan Renja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang;
- e. Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja;
- f. Perubahan Renja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- g. Perubahan Renja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- h. Perubahan Renja Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan;
- i. Perubahan Renja Dinas Lingkungan Hidup;
- j. Perubahan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

- k. Perubahan Renja Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - l. Perubahan Renja Dinas Perhubungan;
 - m. Perubahan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - n. Perubahan Renja Dinas Perdagangan;
 - o. Perubahan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian;
 - p. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu;
 - q. Perubahan Renja Dinas Kebudayaan;
 - r. Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan
 - s. Perubahan Renja Dinas Pariwisata.
- (4) Perubahan Renja Kantor Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah Perubahan Renja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (5) Perubahan Renja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri atas:
- a. Perubahan Renja Kecamatan Srandakan;
 - b. Perubahan Renja Kecamatan Sanden;
 - c. Perubahan Renja Kecamatan Pajangan;
 - d. Perubahan Renja Kecamatan Sedayu;
 - e. Perubahan Renja Kecamatan Pandak;
 - f. Perubahan Renja Kecamatan Kasihan;
 - g. Perubahan Renja Kecamatan Bantul;
 - h. Perubahan Renja Kecamatan Bambanglipuro;
 - i. Perubahan Renja Kecamatan Kretek;
 - j. Perubahan Renja Kecamatan Pundong;
 - k. Perubahan Renja Kecamatan Sewon;
 - l. Perubahan Renja Kecamatan Jetis;
 - m. Perubahan Renja Kecamatan Imogiri;
 - n. Perubahan Renja Kecamatan Dlingo;
 - o. Perubahan Renja Kecamatan Pleret;
 - p. Perubahan Renja Kecamatan Banguntapan; dan
 - q. Perubahan Renja Kecamatan Piyungan.

Pasal 4

Uraian rinci perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul

pada tanggal 24 AGUSTUS 2018

BUPATI BANTUL

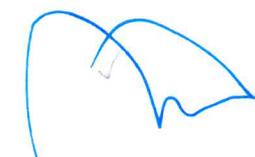


SUHARSONO

Diundangkan di Bantul

pada tanggal 24 AGUSTUS 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,



RIYANTONO

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 95 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL
TAHUN 2018

**DINAS PERTANAHAN
DAN TATA RUANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dilakukan perubahan dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dan menjadi landasan penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan RAPBD Tahun 2018. Serta sebagai bahan untuk penyusunan Perubahan RKPD adalah Rancangan Perubahan Renja Pemerintah Daerah (OPD)

Renja OPD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul merupakan dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun namun untuk menyesuaikan dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan dilakukan perubahan Renja PD Perubahan Renja PD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perubahan perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (Perubahan RKPD) Kabupaten Bantul, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra PD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja PD disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Perubahan Renja PD digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perubahan Anggaran (RKPA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Kabupaten dan

sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD-Perubahan Kabupaten Bantul.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang dijadikan landasan dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2018, yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- b. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Tahun 2015-2019;
- f. Peraturan Daerah DIY Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah DIY Tahun 2017-2022;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2010–2030;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016–2021

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
- k. Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 80 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018.

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul. Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan adalah untuk mensinergikan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang dan pertanahan dalam program dan kegiatan pembangunan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Renja Dinas Tata Ruang dan Pertanahan Kabupaten Bantul tahun 2018 sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV. PENUTUP

BAB II
EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SAMPAI TRIWULAN II TAHUN 2018

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Sampai dengan Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan rencana program/kegiatan perubahan tahun 2018 memperhatikan realisasi capaian kinerja tahun 2018 sampai dengan triwulan II, serta realisasi pelaksanaan APBD Dinas Pertanahan dan Tata Ruang sampai dengan bulan Juni 2018 (Triwulan II).

2.1.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan Tahun 2017 Dan Capaian Renstra Urusan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan

Tahun 2018 Dinas Pertanahan dan Tata Ruang merupakan Perangkat Daerah yang menjalankan urusan pertanahan dan tata ruang. Pada Tahun 2017 melaksanakan anggaranyang terdiri dari 4 program dan 17 kegiatan dengan target anggaran 3,407,692,700,- realisasi Rp 2,919,532,732,- capaian keuangan sebesar 85.675%. Secara rinci realisasi dan capaian tahun 2017 dapat dilihat dari tabel berikut:

Laporan Realisasi Program/Kegiatan APBD Tahun Anggaran 2017 (Belanja Langsung)
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran										
1.1	Penyediaan jasa, peralatan dan perlengkapan perkantoran	183.772.000	100	100	0	183.772.000	170.382.368	92.714	7.286	<p>Pembayaran telepon : 12 Kali dari 12 Kali.</p> <p>Pembayaran surat kabar/ majalah : 12 Kali dari 12 Kali.</p> <p>Belanja Kir dan STNK : 12 Kali dari 12 Kali. jumlah materai : 795 Lembar dari 700 Lembar. Pembayaran Honor Pengelola Keuangan dan Barang : 12 ob dari 12 ob.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pembelian meterai, Pembelian ATK, Pembelian Alat listrik, Pembelian peralatan kebersihan dan bahan pembersih, pembayaran telepon, air dan listrik, Pembayaran honor pengelola keuangan dan barang, pembayaran pajak kendaraan bermotor</p> <p>Faktor penghambat:</p> <p>Tidak ada</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia</p>
1.2	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	109.582.700	100	98	2	109.582.700	87.969.797	80.277	19.723	<p>Jumlah Koordinasi ke dalam daerah : 9 Kali dari 48 Kali.</p> <p>Jumlah makan dan minum rapat : 64 Kali dari 75 Kali.</p> <p>Jumlah Koordinasi ke luar daerah : 12 kali dari 12 kali.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Terlaksananya rapat-rapat, koordinasi dan konsultasi</p> <p>Faktor penghambat:</p> <p>Efisiensi Anggaran</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia</p>

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1 1.3	Pelayanan Administrasi Perkantoran Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	142.900.000	100	95	5	142.900.000	140.785.000	98.52	1.48	Jumlah pengisian tabung gas : 12 Kali dari 12 Kali. Jumlah Honorarium non PNS : 12 ob dari 12 ob.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Gas, Pembayaran honor pegawai kontrak Faktor penghambat: Efisiensi Anggaran Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
2	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur										
2.1	Pembangunan/Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor	125.000.000	100	100	0	125.000.000	123.082.500	98.466	1.534	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor : 1 Unit dari 1 Unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Penggantian rangka baja, penggantian genteng, eternit, pengecatan, pemasangan keramik, penimbunan, pembayaran Honor PPK Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
2.2	Pengadaan/Rehabilitasi Kendaraan Dinas/Operasional	93.000.000	100	100	0	93.000.000	85.901.000	92.367	7.633	Jumlah pembelian Kendaraan Dinas/Operasional : 6 Unit dari 6 Unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian Kendaraan Dinas Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1 2.3	Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	10.000.000	100	100	0	10.000.000	8.960.000	89.6	10.4	Jumlah peralatan perlengkapan : 3 jenis dari 3 jenis.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pembelian kursi putar, printer, ipad Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP Tersedia
2.4	Pemeliharaan Rumah dan Gedung Kantor	38.138.300	100	100	0	38.138.300	35.454.000	92.962	7.038	Jumlah Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor : 1 Unit dari 1 Unit.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Pengecatan, pembuatan taman, penggantian genteng Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu , UP. tersedia
2.5	Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	146.707.500	100	100	0	146.707.500	144.729.600	98.652	1.348	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional : 56 Kali dari 58 Kali.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servis dan penggantian suku cadang kendaraan dinas roda 4 dan 2 Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
2.6	Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan	31.767.200	100	100	0	31.767.200	26.176.000	82.399	17.601	Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor : 42 Kali dari 45 Kali.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Servis peralatan dan perlengkapan kantor (AC, Printer, Komputer, Plotter, dll)

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran										Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
3	Perencanaan Tata Ruang										
3.1	Penyusunan Rencana Tata Ruang	1.100.000.000	100	100	0	1.100.000.000	1.030.091.997	93.645	6.355	Jumlah Dokumen Tata Ruang : 9 Dokumen dari 9 Dokumen.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Tersusunnya Dokumen Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
4	Penataan Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan Pemanfaatan tanah										
4.1	Penataan Penguasaan, pemilikan penggunaan dan pemanfaatan tanah	580.995.000	100	100	0	580.995.000	508.558.050	87.532	12.468	Jumlah sosialisasi pemanfaatan tanah kas desa : 4 kali dari 4 kali.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Persertifikatan tanah kas desa, pemanfaatan tanah kas desa, rekomendasi pemanfaatan tanah kas desa Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
4.2	Pemberdayaan PPAT Kecamatan	2.000.000	100	100	0	2.000.000	2.000.000	100	0	Jumlah Pemberdayaan PPAT kecamatan :	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran									4 Kali dari 4 Kali.	<p>Terlaksananya Rapat koordinasi</p> <p>Faktor penghambat: Tidak ada</p> <p>Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia</p>
4.3	Persertifikatan dan sewa tanah pemerintah DIY.	192.030.000	100	90	10	192.030.000	82.122.075	42.765	57.235	<p>Jumlah tanah yang disertifikatkan : 0 bidang dari 5 bidang. Pembayaran Sewa Tanah Kas Desa : 3 bidang dari 3 bidang.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pembayaran sewa tanah, koordinasi, proses persertifikatan tanah pemda yang terkena program pemda</p> <p>Faktor penghambat: Pemberkasan pendaftaran tanah dikarenakan pencarian data dan dokumen perolehan tanah Pemda yang akan didaftarkan ke Kantor Pertanahan sehingga tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pertanahan</p> <p>Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia</p>
4.4	Persertifikatan tanah warga (PRODA)	379.250.000	100	100	0	379.250.000	233.109.860	61.466	38.534	<p>Jumlah Persertifikatan Tanah Warga (PRODA) : 400 Bidang dari 400 Bidang.</p>	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Pemberkasan, pendaftaran, persertifikatan, sosialisasi, pembagian sertifikat tahun lalu</p> <p>Faktor penghambat:</p>

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1	Pelayanan Administrasi Perkantoran										tumpuan kegiatan bersamaan didesa (PTSL, Proda, identifikasi tanah), Batas saksi yg ada di desa sangat minim, berkas tidak lengkap (ahli waris di luar jawa, ahli waris tidak tahu keberadaannya), SDM penanganan pertanahan masih kurang, harus jempot bola, proses sertifikat masih di BPN Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia,
4.5	Pemanfaatan Tanah SG	22.600.000	100	100	0	22.600.000	21.347.500	94.458	5.542	Jumlah bidang tanah yang dimohonkan ijin / kekancingan : 14 bidang dari 14 bidang.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Peninjauan lokasi, pemasangan patok,pemanfaatan tanah Sultan Ground Faktor penghambat: Tidak ada Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia
4.6	Penanganan Permasalahan Pertanahan	18.950.000	100	99	1	18.950.000	15.039.000	79.361	20.639	Cakupan permasalahan pertanahan yang tertangani : 5 Permasalahan dari 5 Permasalahan.	Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan: Fasilitasi penanganan permasalahan pertanahan (tanah kas desa, tanah warga) Faktor penghambat: SDM di desa minim, Kasusnya terjadi sebelum tahun 1985 Faktor pendukung: DPA/SPD tepat waktu, UP tersedia

No	Program/Kegiatan	Pagu	Fisik (Rata-Rata)			Keuangan				Keluaran	Keterangan
			Target	Realisasi	Deviasi	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Deviasi		
1 5	Pelayanan Administrasi Perkantoran Pengendalian Pemanfaatan Ruang										
5.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	231.000.000	100	100	0	231.000.000	203.823.985	88.235	11.765	Jumlah pengawasan yang ditangani : 560 kali dari 600 kali.	<p>Tahapan pekerjaan (fisik) yang sudah dilakukan:</p> <p>Penyusunan 2 kajian naskah akademik dan pembelian aplikasi broadcast</p> <p>Faktor penghambat:</p> <p>Penetapan perubahan anggaran yang mundur dan keterbatasan UP sehingga tidak di SPJkan</p> <p>Faktor pendukung:</p> <p>DPA/SPD tepat waktu</p>
Jumlah		3,407,692,700	100	98.941		3,407,692,700	2,919,532,732	85.675			

2.1.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Urusan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan Triwulan II Dan Capaian Renstra Urusan Tata Ruang dan Urusan Pertanahan Tahun Berjalan

Tahun Anggaran 2018 terdiri dari 8 program dan 24 kegiatan dengan target anggaran Rp. 5.362.717.006,00 Untuk tahun anggaran 2018 dengan Capaian sampai dengan triwulan II.- Realisasi keuangan untuk urusan tata ruang dan pertanahan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Lingkup Kabupaten/kota
Renja Perangkat Daerah Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul
Periode Pelaksanaan:2016-2021**

Indikator dan target kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada sasaran RKPD:

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
	BELANJA LANGSUNG						2,919,532,732		5,362,717,006		1,152,198,195		1,152,198,195				
		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Capaian nilai AKIP	84	1,524,183,104		399,137,165		1,121,249,400		298,096,028		298,096,028		697,233,193		46
		Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Jumlah Jenis ATK		550,245,150		170,382,368	24 jenis ATK Kegiat an	423,265,400	19	140,995,519	19	140,995,519		311,377,887		57
			Jenis alat listrik dan elektronik					20 Jenis		16		16					
			Jumlah belanja materai					850 lemba r		434		434					
			Jenis peralatan kebersihan					24 jenis		23		23					
			Jumlah pengisian tabung gas					15 kali		6		6					
			Jumlah bulan pembayaran					12 bulan		6		6					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
			telepon														
			Jumlah bulan pembayaran air					12 bulan		5		5					
			Jumlah bulan pembayaran jasa listrik					12 bulan		6		6					
			Jumlah eksemplar pembayaran surat kabar					24 eksem plar		12		12					
			Jumlah bulan pembayaran jasa internet					12 bulan		6		6					
			Jumlah barang cetakan					100 rim		22		22					
			Jumlah belanja pengandaan					25 kegiat an		16		16					
			Sampah terangkut					12 kali		6		6					
			Partisipasi pameran dan karnaval					3 kali									
			Spanduk, papan nama					30 unit		7		7					
			Konsumsi Rapat					200 dos		151		151					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
					600,193,154		87,969,797	400 dos	450,184,000	214	64,800,509	214	64,800,509		152,770,306		25.45
		Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tersedianya makan dan minum rapat					199 op		11		11					
			Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah					643 op		35		35					
			Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah														
		Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Belanja pegawai honor non PNS		373,744,800		140,785,000	72 ob	247,800,000	30	92,300,000	30	92,300,000		233,085,000		62.36
			Honoraarium pegawai kontrak ahli					24 ob		6		6					
			Honorarium tenaga operator komputer					12 ob		5		5					
			Honorarium pegawai kontrak					12 ob		5		5					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
			(Resepsionis)														
			Honorarium Arsiparis					12 ob		5		5					
		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Cakupan pemenuhan sarana dan prasarana aparatur	85	1,371,126,637		424,303,100		850,157,000		271,958,593		271,958,593		696,261,693		50.78
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantoor	Bahan- bahan pemeliharaa n bangunan gedung, halaman, pagar dan tempat parkir		60,952,637		35,454,000	12 bulan	45,727,000	5	22,899,500	5	22,899,500		58,353,500		95.74
			Honorarium tenaga harian lepas untuk gedung kantoor,pagar , halaman dan tempat parkir					12 bulan		5		5					
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasi onal	Jumlah belanja BBM, Suku cadang, jasa servis dan pajak kendaraan		221,624,000		144,729,600	19 kenda raan dinas	170,480,000	7	69,455,950	7	69,455,950		214,185,550		96.64

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
		Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Servis peralatan dan perlengkap an		66,550,000		26,176,000	12 bulan	40,000,000	5	11,490,000	5	11,490,000		37,666,000		56.60
		Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan filling kabinet		22,000,000		8,960,000	1 unit	593,950,000	1	168,113,143	1	168,113,143		177,073,143		
			Pengadaan tong sampah					3 unit		3		3					
			Pengadaan laptop					2 unit		2		2					
			Pengadaan printer					3 unit		0		0					
			Pengadaan printer A3					3 unit		0		0					
			Pengadaan monitor LED					2 unit		1		1					
			Pengadaan Modem					1 unit		1		1					
			Pengadaan Genset					1 unit		0		0					
			Pengadaan perlengkap an komputer					1 unit		0		0					
			Pengadaan alat potong rumput					1 unit		1		1					
			Pengadaan Mebelair dan interior ruang rapat					1 unit		0		0					

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
			Pengadaan kamera					1 unit		1		1					
			Pengadaan LCD Proyektor					1 unit		0		0					
			Pengadaan AC					4 unit		0		0					
			Pengadaan GPS					1 unit		0		0					
		Pembangunan Rehabilitasi Rumah dan Gedung Kantor			1,000,000,000		123,082,500					0		123,082,500		12.31	
		Pengadaan/R ehabilitasi Kendaraan Dinas/Operas ional					85,901,000					0		85,901,000			
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		100	100,000,000				59,800,000		52,550,000		52,550,000		52,550,000		52.55
		Pengembang an Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksanan ya Bimtek		100,000,000			55 ok	59,800,000	55	52,550,000	55	52,550,000		52,550,000		52.55
		Program peningkatan pengembang an sistem	Cakupan Nilai Evaluasi Kinerja	83	196,282,570				147,470,000		111,290,000		111,290,000		111,290,000		56.70

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
		pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
		Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	Pembayaran honor pengelola keuangan,ba rang		133,193,170			12 ob	100,070,000	6	67,435,000	6	67,435,000		67,435,000		50.63
		Pemutakhiran Data	Belanja konsultansi SMM		63,089,400			1 unit	47,400,000	1	43,855,000	1	43,855,000		43,855,000		69.51
		Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Meningkatka n penyelenggar aa n pelayanan pertanahan dan ruang	100	435,340,800		862,176,485	100	555,558,506		122,954,074		122,954,074		985,130,559		
		Inventarisasi tanah kas desa	Data base tanah desa		60,000,000			75 desa	40,225,000	15	14,300,000	15	14,300,000		14,300,000		23.83
		Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	pendaftaran tanah		187,083,400		82,122,075	88 doku men	140,058,506	0	66,938,574	0	66,938,574		149,060,649		79.68
		Persetifikatan tanah warga (PRODA)	terdaftar tanah milik warga		-		233,109,860	100 doku men	269,525,000	40	22,525,500	40	22,525,500		255,635,360		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
		Pemanfaatan Tanah SG	Rekomendas i Bupati		159,593,600		21,347,500	30 doku men	105,750,000	20	19,190,000	20	19,190,000		40,537,500		25.40
		Penataan,pen guasaan,pemi likan,penggun aan dan pemanfaatan tanah			-		508,558,050						0		508,558,050		
		Pemberdayaa n PPAT Kecamatan			28,663,800		2,000,000						0		2,000,000		6.98
		Penanganan permasalahan pertanahan			-		15,039,000						0		15,039,000		
		Program penyelesaian konflik- konflik pertanahan		20	21,384,000				8,100,000		1,025,000		1,025,000		1,025,000		4.79
		penyelesaian konflik- konflik pertanahan	Koordinasi dan peninjauan lokasi		21,384,000			5 perma salah an	8,100,000	3	1,025,000	3	1,025,000		1,025,000		4.79
		Program Perencanaan Tata Ruang	Meningkatny a ketersediaan dokumen rencana tata ruang	4	2,820,000,000		1,030,091,997		2,066,207,100		135,444,500		135,444,500		1,165,536,497		41.33

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		9		12		13 = 6 + 12		14 = 13/5 X 100%	
		Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Raperda RTRW dan KLHS RTRW		65,000,000			2 dokumen	210,157,100	0	58,310,550	0	58,310,550		58,310,550		89.71
		Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR		165,000,000			1 dokumen	113,100,000	0	1,550,000	0	1,550,000		1,550,000		0.94
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	sosialisasi tentang perundang-undangan tentang rencana tata ruang		90,000,000			4 desa	45,700,000	0	0	0					0.00
		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ		850,000,000			2 dokumen	691,800,000	0	0	0					0.00
		Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Dokumen Rencana Teknis Ruang Kawasan		300,000,000			1 dokumen	54,900,000	1	0	1					0.00
		Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen RTBL dan Masterplan		1,350,000,000			6 dokumen	901,450,000	0	74,353,950	0	74,353,950		74,353,950		5.51
		Studi tentang Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen					1 dokumen	49,100,000	1	1,230,000	1	1,230,000		1,230,000		

No	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2016-2021 (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2018		Realisasi Kinerja Pada Triwulan s/d II		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2018		Tingkat Capaian Kinerja & Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d 2018 (%)	
				5	6	7	9	12	13 = 6 + 12	14 = 13/5 X 100%							
1	2	3	4	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
		JUMLAH			7,847,885,036		2,919,532,732		5,362,717,006		1,152,198,195		1,152,198,195		4,071,730,927		

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan suatu tahapan dalam proses pembangunan. Perencanaan akan menghasilkan rencana yang selanjutnya diimplementasikan dalam pelaksanaan pembangunan. Perencanaan yang baik akan sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan suatu pembangunan, oleh karena itu dalam menyusun perencanaan pembangunan hendaknya diperhatikan berbagai faktor yang kemungkinan memiliki pengaruh bagi berhasil tidaknya pelaksanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan harus memperhatikan jangkauan perencanaan dengan menekankan tujuan utama dari perencanaan tersebut dengan melihat visi dan misi pembangunan daerah serta isu strategis. Analisis kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berisikan capaian kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan berdasarkan indikator kinerja utama (IKU) s.d triwulan 2 ada pada tabel berikut:

Laporan Capaian Sasaran dan Anggaran
DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG
Periode 2017-2021 Tahun Anggaran 2018 Bulan Juni

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Kinerja			Program	Keuangan		
				Target	Realisasi	%Realisasi		Pagu	Realisasi	%Realisasi
1	Meningkatnya persertifikatan tanah	Cakupan sertifikasi tanah	%	88	84	95,54	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	555.558.506	122.954.074	22,13
							Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan	8.100.000	1.025.000	12,65
2	Meningkatnya kualitas penataan dan pengelolaan ruang	Jumlah dokumen Raperda Tata Ruang	Dokumen	3	2	66,66	Program Perencanaan Tata Ruang	2.066.207.100	135.444.500	6,56
3	Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian	Prosentase cakupan pengendalian tata ruang	%	72	71	98,61	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	554.175.000	158.880.000	28,67

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah, kajian hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra Perangkat Daerah, maka dirumuskan isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD. Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas permasalahan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi PD berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra PD.

a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Tata Ruang dan Pertanahan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan dinas.

Sejak disahkan Peraturan Bupati Bantul Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul mempunyai fungsi pelayanan berupa Pelaksanaan, pelayanan, pembinaan dan pengendalian urusan pemerintahan bidang pertanahan dan urusan pemerintahan bidang tata ruang perumusan kebijakan bidang pertanahan dan penataan ruang Bidang Pertanahan akan melakukan pembebasan tanah PSG melalui Dana keistimewaan memerlukan dana pendampingan untuk melakukan appraisal tanah PSG dan tanah pengganti.

Bidang Pengaturan dan Pembinaan dalam penyusunan Perda RDTR dan RTRW diperlukan dokumen KLHS yang sudah divalidasi (sejak tahun 2016) sementara ini dokumen KLHS Sewon dan KLHS Kasihan yang ada belum divalidasi dan perlu di up date.

Bidang Pelaksanaan dan Pengawasan perlu melakukan monitoring dan pengawasan terhadap program nasional pemerintah (PTSL) dan melakukan sosialisasi terhadap pemanfaatan ruang di masyarakat.

b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas, antara lain:

- 1) Perlu peningkatan pengawasan dan pengendalian ruang;
- 2) Lambatnya pengadministrasian pertanahan.
- 3) Kurangnya personil dalam pengawasan alih fungsi lahan .

- 4) Belum adanya sanksi yang tegas terhadap alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan RTRW dan RDTR.
- 5) Belum adanya komitmen yang kuat antara semua stakeholder
- 6) Proses penyusunan peraturan yang melalui banyak tahapan sehingga memperlambat proses perda RDTR

c. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang

- 1) Mengembangkan sarana dan prasarana SIM (Sistem Informasi Geografi) Tata Ruang dan Pertanahan.
- 2) Masih adanya sengketa masalah pertanahan
- 3) Banyaknya tanah sultan ground yang dikuasai oleh masyarakat secara administrasi belum memiliki kekancingan.
- 4) Masih perlunya tertib administrasi pertanahan
- 5) Adanya kegiatan kegiatan yang bersifat pengawasan dan monitoring terhadap pemanfaatan ruang.
- 6) Adanya pembinaan kepada masyarakat terkait masalah pertanahan dan tata ruang.
- 7) Perlunya data, fakta dan analisa untuk bahan penyusunan RDTR.
- 8) Perlunya penyelesaian pemetaan tata ruang

d. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan, antara lain :

- 1) Masih terdapat alih fungsi lahan yang tidak sesuai peruntukan Tata Ruang.
- 2) Pencapaian sertifikasi tanah belum 100%
- 3) Melaksanakan sosialisasi pemanfaatan ruang kepada masyarakat.
- 4) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang
- 5) Melaksanakan kegiatan Iklan layanan masyarakat di media iklan layanan masyarakat audio visual di televisi / media sosial, pemasangan baliho dan pembuatan banner.
- 6) Membuat / mengembangkan Sistem Informasi Tata Ruang
- 7) Melakukan penyempurnaan dan koordinasi dengan propinsi / BIG untuk pemetaan rencana tata ruang.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH

Rencana Program dan Kegiatan Dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Tahun 2018 yang dituangkan dalam Bab III ini, adalah merupakan formulasi dari rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Adapun penjabarannya disajikan dalam bentuk Matrik Rencana Program dan Kegiatan berdasarkan Perangkat Daerah yang menanganinya.

Uraian Rencana Program dan Kegiatan yang disajikan dalam Bab III ini adalah bersifat menyeluruh, yang didanai oleh APBD perubahan Kabupaten Bantul tahun 2018. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul tahun 2018. Adapun rincian Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Bantul Tahun 2018 dapat dilihat dalam Tabel Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018, dengan pagu indikatif Sebelum Perubahan sebesar **Rp. 5.362.717.006** dan pagu **Sesudah Perubahan sebesar Rp.5.568.717.006 dengan jumlah program / kegiatan sebanyak 8 Program dan 24 Kegiatan** yang tertera pada Tabel Matrik Program.

REKAPITULASI DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) TAHUN 2018
KABUPATEN/KOTA : KABUPATEN BANTUL

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

KOD E	BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9
2.04	Pertanahan				2.742.334.906	2.921.365.006	
2.04 - 2.4.0101 - 1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.121.249.400	1.066.279.500	
2.04 - 2.4.0101 - 1.36	Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran	Konsumsi Rapat	200 dos	16 jenis	423.265.400	397.745.500	Efisiensi biaya listrik
2.04 - 2.4.0101 - 1.37	Penyediaan Rapat-rapat, Koordinasi dan Konsultasi	Tercapainya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	643 op	643 op	450.184.000	450.184.000	
2.04 - 2.4.0101 - 1.38	Penyediaan Jasa Pengelola Pelayanan Perkantoran	Honorarium	132 ob	121 ob	247.800.000	218.350.000	Efisiensi biaya tenaga non PNS
2.04 - 2.4.0101 - 2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur				850.157.000	953.157.000	
2.04 - 2.4.0101 - 2.22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Honorarium tenaga harian lepas untuk gedung kantor, pagar, halaman dan tempat parkir	12 bulan	6 unit	45.727.000	65.727.000	Untuk Pemeliharaan Jaringan Listrik
2.04 - 2.4.0101 - 2.24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah belanja BBM, Suku cadang dan jasa servis, dan pajak kendaraan	19 kendaraan dinas	19 kendaraan dinas	170.480.000	170.480.000	
2.04 - 2.4.0101 - 2.30	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya peralatan kantor	1 tahun	7 jenis	40.000.000	40.000.000	
2.04 - 2.4.0101 - 2.51	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan	Pengadaan peralatan kantor	1 Unit	16 jenis	593.950.000	676.950.000	Pengadaan Sound system, Laptop
2.04 - 2.4.0101 - 5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur				59.800.000	59.800.000	
2.04 - 2.4.0101 - 5.11	Pengembangan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Terlaksananya Bimtek	55 ok	55 ok	59.800.000	59.800.000	
2.04 - 2.4.0101 - 6	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan				147.470.000	147.470.000	

KOD E	BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9
2.04 - 2.4.0101 - 6.8	Penyusunan laporan keuangan, barang, kepegawaian, dan ketatausahaan	belanja konsultansi SMM	1 Dokumen	37 Dokumen	100.070.000	100.070.000	
2.04 - 2.4.0101 - 6.12	Pemutakhiran Data	Terwujudnya software arsip	1 Unit	1 aplikasi	47.400.000	47.400.000	
1.03	Pekerjaan Umum & Penataan Ruang				2.620.382.100	2.647.352.000	
1.03 - 2.4.0101 - 32	Program Perencanaan Tata Ruang				2.066.207.100	2.108.382.000	
1.03 - 2.4.0101 - 32.1	Penyusunan kebijakan tentang penyusunan rencana tata ruang	Tersusunnya RTRW : 1. Raperda RTRW 2. Penyusunan KLHS	2 Dokumen	2 Dokumen	210.157.100	203.943.500	Efisiensi biaya lelang
1.03 - 2.4.0101 - 32.2	Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL	Raperda RDTR	1 Dokumen	3 Dokumen 2 dokumen	113.100.000	171.095.000	Penyusunan KLHS Sewon dan KLHS Kasihan
1.03 - 2.4.0101 - 32.3	Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang	4 desa	4 desa	45.700.000	45.700.000	
1.03 - 2.4.0101 - 32.5	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	Tersusunnya Dokumen RDTR dan PZ	2 Dokumen	2 Dokumen	691.800.000	688.300.000	Efisiensi biaya lelang
1.03 - 2.4.0101 - 32.6	Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan	Tersusunnya rencana Teknis Ruang Kawasan	1 Dokumen	1 Dokumen	54.900.000	54.603.500	Efisiensi Biaya Rapat
1.03 - 2.4.0101 - 32.7	Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan	Tersusunnya Dokumen RTBL dan Masterplan	6 Dokumen	6 Dokumen	901.450.000	896.876.000	Efisiensi biaya lelang
1.03 - 2.4.0101 - 32.38	Studi tentang Tata Ruang	Jumlah Penyusunan Dokumen RTH	1 Dokumen	1 Dokumen	49.100.000	47.864.000	Efisiensi biaya lelang
1.03 - 2.4.0101 - 34	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang				554.175.000	538.970.000	
1.03 - 2.4.0101 - 34.1	Penyusunan kebijakan pengendalian pemanfaatan ruang	terselenggaranya pemanfaatan ruang menjadi lebih terkendali	12 bulan	3 dokumen	275.000.000	288.800.000	Monitoring PTSL
1.03 - 2.4.0101 - 34.10	Pengembangan data pemanfaatan ruang	Sosialisasi Di Media Televisi	6 Kali	11 Kali	279.175.000	250.170.000	Efisisensibiaya sosialisasi
2.04	Pertanahan				2.742.334.906	2.921.365.006	
2.04 - 2.4.0101 - 16	Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah				555.558.506	686.558.506	
2.04 - 2.4.0101 - 16.9	Inventarisasi tanah kas desa	Data Base Tanah Desa	75 desa	75 desa	40.225.000	40.225.000	

KOD E	BIDANG URUSAN /PROGRAM /KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
			RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	RKPD 2018	RANCANGAN AKHIR RKPD 2018 PERUBAHAN	
1	3	4	5	6	7	8	9
2.04 - 2.4.0101 - 16.13	Pengadaan tanah dari tanah milik warga				0	0	
2.04 - 2.4.0101 - 16.14	Persetifikatan dan sewa tanah Pemerintah DIY	Pendaftaran Tanah	88 dokumen	91 dokumen	140.058.506	140.058.506	
2.04 - 2.4.0101 - 16.16	Persetifikatan tanah warga (PRODA)	Terdaftarnya tanah milik warga	100 dokumen	100 dokumen	269.525.000	269.525.000	
2.04 - 2.4.0101 - 16.17	Pemanfaatan Tanah SG	Rekomendasi Bupati	30 dokumen	30 dokumen 2 paket 1 Bidang	105.750.000	236.750.000	Penyusunan appraisal tanah PSG dan Tanah Pengganti, Biaya Sewa tanah Pemerintah
2.04 - 2.4.0101 - 17	Program penyelesaian konflik-konflik pertanahan				8.100.000	8.100.000	
2.04 - 2.4.0101 - 17.1	penyelesaian konflik-konflik pertanahan	Terlaksananya Koordinasi dan Peninjauan Lokasi	5 Permasalahan	5 Permasalahan	8.100.000	8.100.000	
					5.362.717.006	5.568.717.006	

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 merupakan perubahan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2018 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2018 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA Perangkat Daerah Tahun 2018.


BUPATI BANTUL,

SUHARSONO